



EDISI JUMAT 24 JULI 2026

H A R I A N

LENTERA

Inspirasi Perubahan

TODAY

02

GOVERNMENTTODAY

Di Harlah PKB, Presiden Singgung 'Prabowonomic'

05

NUSANTARA

Hakim Kabulkan Perlawanan dr Tifa, Sidang Kasus Ijazah Jokowi Dihentikan

10

LISTSTYLE

Kaus Kaki dan Loafers, Duet Klasik yang Jadi Tren Lagi

SAH! KONSUMEN BERHAK KUOTANYA **TAK HANGUS**

Mahkamah Konstitusi (MK) putusan operator seluler wajib menyediakan pilihan paket tanpa masa hangus bagi pengguna. Hal ini usai MK mengabulkan sebagian permohonan pengujian materiil terhadap ketentuan mengenai layanan kuota internet dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja). Melalui Putusan Nomor 273/PUU-XXIII/2025 yang dibacakan dalam sidang pleno terbuka pada Kamis (23/7/2026), MK menyatakan penyelenggara telekomunikasi wajib menyediakan pilihan layanan yang menjamin sisa kuota internet milik pengguna tetap aktif dan dapat digunakan. Putusan ini bisa disebut sebagai kemenangan masyarakat. Sebab, data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) mencatat jumlah pengguna internet di Indonesia telah mencapai 235.261.078 jiwa atau sekitar 81,72 persen dari total populasi nasional. Perputaran uangnya pun relatif besar. Rata-rata pengeluaran warga Indonesia untuk membeli paket data internet adalah sekitar Rp 50.000 hingga Rp 100.000 per bulan. Jika dikalkulasikan, belanja data internet per orang berkisar antara Rp 600.000 hingga Rp 1.200.000 per tahun. Sementara menurut Indonesian Audit Watch (IAW), kerugian rakyat akibat hangusnya sisa kuota internet yang tidak terpakai ditaksir mencapai Rp63 triliun per tahun secara nasional. **BACA HAL 11...**

6 Skema Opsi Perlindungan Kuota Konsumen



Kompensasi:

Penyesuaian nilai manfaat atas sisa kuota yang belum terpakai.



Refund:

Pengembalian nilai ekonomi

sisa kuota dalam bentuk saldo atau pengembalian dana.



Bentuk Perlindungan Lain :

Inovasi skema fleksibel lainnya yang proporsional dan adil



Akumulasi (Rollover) Kuota:

Sisa kuota secara otomatis diakumulasikan ke periode penggunaan berikutnya.



Perpanjangan Masa Aktif:

Kemudahan memperpanjang durasi pemakaian tanpa memotong sisa kuota.



Pengalihan Manfaat:

Fasilitas mentransfer atau mengalihkan sisa kuota ke paket atau pengguna lain.

Sumber:
Putusan MK



Sumber:
Laporan APJII &
Swatama Research,
Juni 2026

Kesenjangan Digital

Wilayah

Jawa

85,95%

Maluku & Papua

69,74%

Usia & Ekonomi

Gen Z/Milenial

>90%

Pre-Boomers

30,88%

Pendapatan

>Rp15 juta

92,69%

Penetrasi Internet



Penetrasi Nasional

81,72%



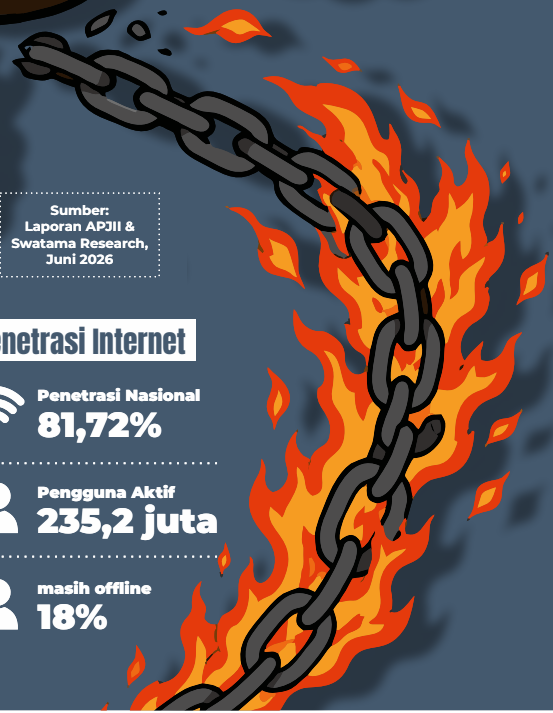
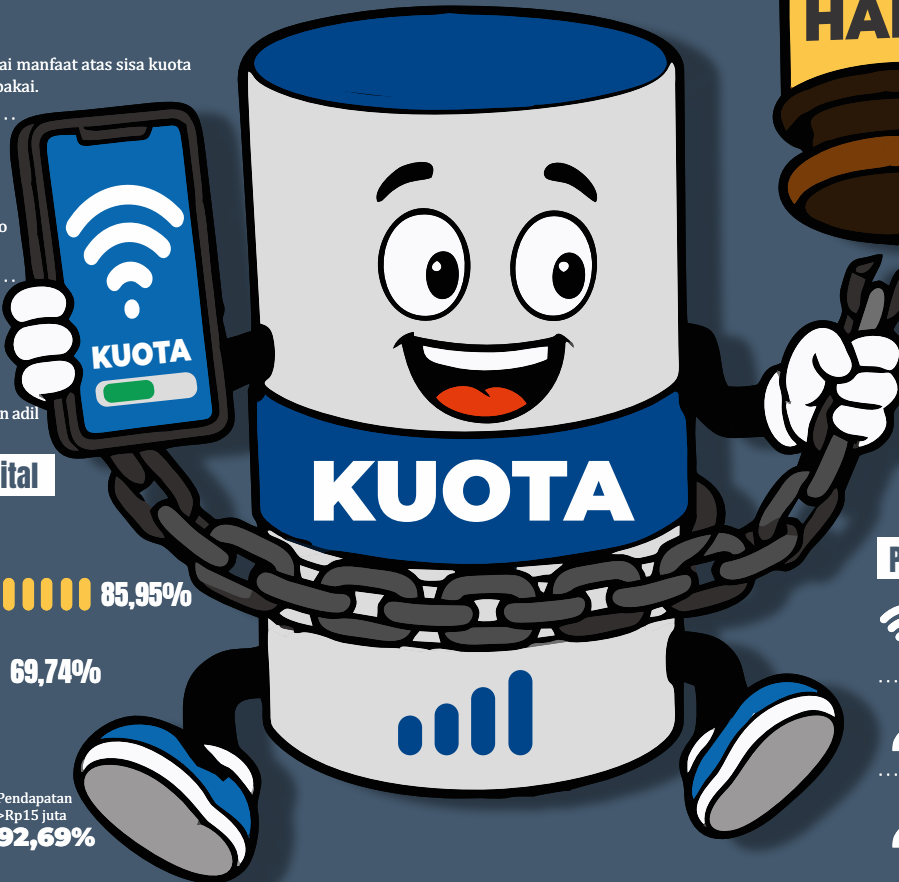
Pengguna Aktif

235,2 juta



masih offline

18%



DI HARLAH PKB, PRESIDEN SINGGUNG 'PRABOWONOMIC'

Presiden Prabowo Subianto menyinggung istilah 'Prabowonomic' saat menghadiri puncak Hari Lahir (Harlah) ke-28 Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Jakarta Convention Center (JCC), Kamis (23/7/2026). Meski mengapresiasi dukungan PKB, Prabowo menegaskan konsep ekonomi yang dijalkannya bukanlah gagasan baru maupun pemikiran pribadi, melainkan implementasi dari amanat Pasal 33 dan Pasal 34 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

Dalam pidatonya, Prabowo mengaku terharu melihat para kader PKB mengenakan kaus bertuliskan "Prabowonomics" sebagai bentuk dukungan terhadap arah kebijakan ekonomi pemerintah.

"Saya terharu karena PKB dalam hari ulang tahunnya dengan begitu tegas menyampaikan dukungan kepada arah baru ekonomi. Saya juga merasa terharu saudara memakai kaos Prabowonomics," ujar Prabowo.

Namun, ia menilai penggunaan namanya untuk menggambarkan konsep ekonomi tersebut sebenarnya tidak tepat.

"Sesungguhnya terus terang saja tidak pantas saudara pakai nama saya di situ."

Prabowo bahkan sempat melontarkan candaan kepada Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, karena kader Gerindra tidak mengenakan kaus serupa.

"Saudara memberi penghargaan yang luar biasa ke saya. Bahkan Gerindra saja enggak pakai kaus kayak kalian. Gimana itu Dasco? Gerindra aja enggak pakai," kata Prabowo yang disambut tawa hadirin.

Ia kemudian menjelaskan bahwa kader Gerindra tidak pernah menggunakan atribut tersebut karena mengetahui dirinya tidak akan mengizinkan.

"Karena mereka tahu saya enggak izinkan. Ini kalau kalian minta izin, tidak mungkin saya izinkan. Benar, benar, saya bukan mau sok merendah, bukan. Tapi memang saya enggak pantas."

Prabowo menegaskan bahwa arah kebijakan ekonomi yang ia perjuangkan bersumber dari cita-cita para pendiri bangsa, Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, serta amanat konstitusi.

"Ketegasan perjuangan saya, keyakinan saya itu adalah keyakinan



Presiden Prabowo Subianto memberikan sambutan saat menghadiri Puncak Harlah PKB ke-28 di JCC, Senayan, Jakarta, Kamis (23/7/2026). Foto: Youtube/ DPP PKB

saya terhadap cita-cita pendiri bangsa, keyakinan saya terhadap Proklamasi 17 Agustus 1945, keyakinan saya terhadap Undang-Undang Dasar negara kita. Keyakinan saya terutama kepada Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 34."

Ia kembali menegaskan bahwa gagasan ekonomi yang dijalkannya bukanlah sesuatu yang baru.

"Pasal 33 dan Pasal 34 Undang-Undang Dasar kita itu keyakinan saya. Gagasan saya tidak ada yang baru, gagasan saya tidak ada yang luar biasa, gagasan saya hanya ingin menegakkan undang-undang dasar kita. Karena saya yakin bahwa Pasal 33 itu dan Pasal 34 itu adalah roh dari perjuangan pendiri-pendiri bangsa kita."

Prabowo juga mengatakan konsep yang sering disebut sebagai "Prabowonomic" sejatinya adalah ekonomi Pancasila yang berpihak kepada rakyat.

"Tidak ada, ini adalah ekonomi Pancasila, konstitusi, ini ekonomi

rakyat. Tapi saya merasa saya sangat dihormati. Jadi saya terima kasih dari hati saya yang paling dalam."

Menurut Prabowo, Pasal 33 dan Pasal 34 UUD 1945 menjadi fondasi agar seluruh rakyat Indonesia memperoleh kehidupan yang layak.

"Saya yakin bahwa Pasal 33 dan Pasal 34 itu adalah roh dari perjuangan pendiri-pendiri bangsa kita. Kita ingin merdeka dari sejak ratusan tahun, puluhan tahun. Kita ingin merdeka agar kita seluruh rakyat Indonesia hidup layak. Kita menginginkan rakyat kita hidup layak."

Pasal 33 UUD 1945 mengatur perekonomian nasional disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan, serta penguasaan negara terhadap cabang-cabang produksi yang penting dan sumber daya alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sementara Pasal 34 mengamankan negara memelihara fakir miskin, anak terlantar, dan menyelenggarakan sistem jaminan sosial.

Sebagai implementasi kedua pasal tersebut, Prabowo menegaskan pemerintah akan menjaga agar kekayaan alam Indonesia dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi masyarakat, terutama kelompok menengah ke bawah.

"Bagaimana kita bisa memberi kehidupan layak kepada rakyat kita kalau kekayaan kita diambil terus, dibawa ke luar negeri dan tidak dinikmati oleh rakyat kita. Ini tidak masuk akal. Di mana ada ilmu ini?"

Prabowo juga mengingatkan agar ekonomi tidak dipandang sebagai ilmu yang rumit, melainkan sesuatu yang dekat dengan kehidupan sehari-hari.

"Ekonomi itu jangan dianggap ilmu dewa-dewa gitu. Ekonomi itu sederhana. Kalau ibu buka warungnya itu ekonomi. Satu cangkir kopi, modalnya berapa? Dijual berapa? Selisihnya itu untung. Untung ditabung. Indonesia ini kekayaannya dibawa ke luar dan tidak ditabung-tabung karena tidak ada di Indonesia."

Di akhir penyampaian, Prabowo kembali menyampaikan apresiasi atas dukungan PKB terhadap arah kebijakan ekonomi pemerintah.

"Pertama-tama, tentunya saya ingin sampaikan penghormatan saya, ucapan terima kasih saya atas kehormatan yang besar diberikan kepada saya untuk hadir dalam acara ini. Saya sungguh merasa bahagia dan merasa terharu hadir di acara malam hari ini."

Dalam kesempatan yang sama, Presiden Prabowo Subianto melontarkan sejumlah candaan jika Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin), Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad, dan Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia sebagai tiga "kancil" politik karena dinilai memiliki kecerdikan. Candaan itu bermula ketika Prabowo mengaku hampir terbawa suasana setelah menyaksikan rangkaian acara Harlah PKB. (wid ist,rls,kum/dya)

Para kader PKB mengenakan kaus Prabowonomics. Foto: Istimewa



DPR BELUM PERNAH BAHAS UNIVERSITAS REPUBLIK INDONESIA

Pembentukan Universitas Republik Indonesia (URI) oleh pemerintah mulai menuai pertanyaan dari DPR RI. Meski Presiden Prabowo Subianto telah melantik jajaran pimpinan lembaga tersebut, Komisi X DPR yang membidangi pendidikan mengaku belum pernah diajak membahas pendirian URI maupun menerima penjelasan resmi mengenai landasan pembentukannya.

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani mengatakan hingga kini komisinya belum pernah membahas pembentukan Universitas Republik Indonesia, baik dalam rapat maupun agenda resmi. Menurut dia, DPR juga belum memperoleh penjelasan formal dari pemerintah mengenai dasar hukum, tugas, fungsi, hingga sumber pendanaan lembaga pendidikan baru tersebut.

"Komisi X DPR RI hingga kini belum pernah membahas pembentukan Universitas Republik Indonesia (URI), baik dalam rapat maupun agenda resmi. Kami belum menerima penjelasan formal mengenai dasar hukum, tugas, fungsi, maupun anggarannya," kata Lalu, Kamis (23/7/2026).

Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menilai pemerintah perlu memberikan penjelasan secara menyeluruh mengenai urgensi pembentukan URI, mengingat



Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani

Indonesia telah memiliki banyak perguruan tinggi negeri maupun lembaga pendidikan kedinasan yang selama ini mencetak aparatur negara dan pemimpin nasional.

Menurut Lalu, pemerintah harus mampu menunjukkan nilai tambah yang akan diberikan URI dibandingkan institusi pendidikan yang sudah ada. Selain itu, pemerintah juga perlu memastikan keberadaan

URI tidak menimbulkan tumpang tindih fungsi maupun kewenangan dengan perguruan tinggi ataupun lembaga pendidikan kedinasan lainnya.

"Menurut kami, pemerintah wajib membuktikan nilai tambah URI di tengah banyaknya PTN dan lembaga kedinasan yang sudah mencetak pemimpin, serta menjamin tidak ada duplikasi peran," ujarnya.

Meski belum memperoleh penjelasan resmi, Komisi X memastikan tetap akan menjalankan fungsi pengawasan apabila pembahasan mengenai URI mulai dilakukan bersama pemerintah. Pengawasan tersebut mencakup rencana pembangunan kampus, desain kelembagaan, hingga penggunaan anggaran negara.

Lalu mengatakan pihaknya kemungkinan akan meminta penjelasan kepada Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi dalam rapat kerja pada masa sidang berikutnya agar kebijakan tersebut memiliki dasar yang jelas dan tidak menimbulkan polemik di tengah masyarakat.

Disebut akan Cetak Pemimpin Nasional

Universitas Republik Indonesia merupakan lembaga pendidikan baru yang dibentuk Presiden Prabowo Subianto sebagai bagian dari upaya pengembangan sumber daya manusia dan pencetakan calon pemimpin nasional.

Pada Rabu (22/7/2026), Presiden melantik Wakil Menteri Pertahanan Donny Ermawan Taufanto sebagai Gubernur Universitas Republik Indonesia dan Guru Besar Institut Teknologi Bandung (ITB) Yos Sunitiyoso sebagai Wakil Gubernur URI berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 80/P Tahun 2026.

Usai pelantikan, Donny menjelaskan bahwa URI merupakan lembaga pendidikan baru yang dirancang untuk membina calon pemimpin Indonesia, baik yang akan berkarier di pemerintahan maupun badan usaha milik negara (BUMN).

Menurut Donny, Presiden Prabowo menaruh perhatian besar terhadap pembangunan sumber daya manusia sebagai fondasi kepemimpinan nasional pada masa mendatang.

"Bapak Presiden sangat concern dengan sumber daya manusia, terutama untuk pemimpin Indonesia di masa depan," kata Donny.

Berbeda dengan perguruan tinggi pada umumnya, URI dirancang sebagai lembaga yang mengintegrasikan sejumlah institusi pendidikan dan pelatihan milik pemerintah dalam satu ekosistem. Pemerintah menyebut URI akan menangani Badan Pengelola Sekolah Unggulan, Badan Pengelola Perguruan Tinggi, serta Lembaga Administrasi Negara (LAN).

Selain itu, pemerintah berencana membangun 10 kampus URI di berbagai wilayah Indonesia. Lulusan URI nantinya akan memperoleh gelar akademik sebagaimana perguruan tinggi lain, mulai dari sarjana hingga profesi tertentu sesuai bidang pendidikan yang ditempuh. (wid,tmp,ist/dya)

Mendiktisaintek:

URI Tak Membawahi Seluruh Kampus



Mendiktisaintek, Brian Yulianto

MENTERI Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yulianto menegaskan pembentukan Universitas Republik Indonesia (URI) tidak akan menjadikan lembaga baru tersebut sebagai induk bagi seluruh perguruan tinggi di Indonesia. Ia juga memastikan kehadiran URI tidak akan memengaruhi fungsi maupun anggaran Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan

T e k n o l o g i (Kemendiktisaintek).

Pernyataan itu disampaikan Brian usai mengikuti rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (23/7/2026), menyusul munculnya berbagai pertanyaan publik mengenai posisi URI dalam sistem pendidikan tinggi nasional.

"Bukan berarti URI itu membawahi seluruh kampus-kampus. Tidak begitu," kata Brian.

Ia menegaskan fungsi Kemendiktisaintek tetap berjalan sebagaimana selama ini meskipun pemerintah membentuk Universitas Republik Indonesia. Menurut dia, pembentukan URI tidak mengubah kewenangan kementerian dalam mengelola

pendidikan tinggi nasional.

Brian mengatakan penjelasan lebih rinci mengenai struktur, tugas, dan posisi URI akan disampaikan langsung oleh Gubernur Universitas Republik Indonesia dalam waktu dekat.

"Fungsi kita tidak berubah. Mungkin nanti dalam waktu dekat Pak Gubernur URI akan lebih menjelaskan lagi bagaimana peran dan posisinya," ujarnya.

Mengenai rencana pembangunan 10 kampus URI yang sebelumnya disampaikan pemerintah, Brian mengatakan hingga kini konsep tersebut masih dalam tahap pembahasan. Pemerintah belum menetapkan secara rinci pola pengelolaan maupun hubungan kelembagaan antara URI dan Kemendiktisaintek.

Meski demikian, ia menjelaskan arah pembentukan URI adalah untuk menjalankan program-program afirmasi dalam pengembangan sumber daya manusia nasional. (wid,ist/dya)

Semua Dikerahkan untuk KDMP Beroperasi September KEMENTERIAN HINGGA TNI-POLRI DITERJUNKAN, BANSOS DAN ELPIJI LEWAT KOPERASI

Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan seluruh kementerian, lembaga, TNI, dan Polri untuk memberikan dukungan penuh terhadap operasional Koperasi Desa (Kopdes) dan Koperasi Kelurahan Merah Putih (KDMP). Pemerintah menargetkan sekitar 25.000 koperasi mulai beroperasi secara bertahap pada Agustus hingga September 2026. Untuk itu, koperasi juga akan menjadi pusat penyaluran bantuan sosial (bansos) serta berbagai barang subsidi pemerintah.

Arahan tersebut disampaikan Presiden dalam rapat terbatas di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (23/7/2026). Rapat yang berlangsung sekitar tiga setengah jam itu membahas percepatan operasional KDMP beserta tata kelolanya.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan keterlibatan lintas kementerian dan lembaga menjadi kebutuhan karena koperasi tersebut akan menjadi infrastruktur pemerintah dalam menyalurkan bantuan sosial, pupuk bersubsidi, elpiji 3 kilogram, bantuan alat dan mesin pertanian, hingga berbagai program pemerintah lainnya.

"Ditegaskan kembali harus didukung penuh," kata Zulkifli Hasan kepada wartawan usai rapat.

Menurut Zulhas, seluruh barang subsidi dan bantuan pemerintah nantinya akan disalurkan melalui Koperasi Desa Merah Putih maupun Koperasi Kelurahan Merah Putih.

"Infrastruktur pemerintah yaitu seluruh barang-barang subsidi, barang-barang bantuan pemerintah, semua nanti penyalurannya melalui Koperasi Desa Merah Putih atau



Mendes PDT Yandri Susanto, Menko Pangan Zulhas, dan Menkop Ferry Juliantono usai rapat terbatas di Istana, Jakarta, Kamis (23/7/2026). (Foto: Biro Sekretariat Presiden)

Koperasi Kelurahan Merah Putih," ujarnya.

Ia menegaskan penyaluran bantuan sosial akan dipusatkan melalui koperasi tersebut.

"Bansos, bantuan pemerintah, semua nanti melalui Kopdes. Terpusat di Kopdes. Nanti di Kopdes semua. Semua Koperasi Desa Merah Putih," katanya. Zulhas menyebut operasional sekaligus penyaluran bantuan melalui KDMP ditargetkan mulai berjalan pada September 2026.

"Operasi kita perkirakan September," ujarnya.

Menurut Zulhas, berbagai program pemerintah yang akan disalurkan melalui KDMP berada di bawah kewenangan sejumlah kementerian dan lembaga. Bantuan sosial dikelola Kementerian Sosial, distribusi pupuk melibatkan badan usaha milik negara, bantuan alat dan mesin pertanian berasal dari Kementerian Pertanian, sedangkan distribusi elpiji 3 kilogram berkaitan dengan sektor energi.

Agrinas Ditugaskan Kelola Selama 2 Tahun

PT Agrinas Pangan Nusantara mendapat mandat dari pemerintah untuk membangun, memenuhi kebutuhan operasional, sekaligus mengelola Koperasi Desa dan Koperasi Kelurahan Merah Putih (KDMP) selama dua tahun sebelum pengelolaannya diserahkan kepada pemerintah desa.

Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara, Joao Angelo De Sousa Mota, mengatakan perusahaan pelat merah tersebut akan terlibat sejak tahap pembangunan hingga operasional koperasi.

"Kita ditugaskan dari pembangunan, pengadaan, dan menjalankannya selama dua tahun," kata Joao kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis, (23/7/2026).

Ia menjelaskan penugasan tersebut merupakan bagian dari

pelaksanaan program KDMP yang menjadi salah satu program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Menurut Joao, Agrinas juga akan menerima para pengelola koperasi yang telah menyelesaikan pendidikan dan pelatihan sebelum ditempatkan di masing-masing koperasi.

"Saya tinggal menunggu. Menunggu siapa yang dididik, nanti habis itu kita terima," ujarnya.

Namun, Joao mengaku belum mengetahui kapan sekitar 30.000 manajer KDMP akan mulai ditempatkan. Ia mengatakan proses pendidikan para calon pengelola bukan menjadi tanggung jawab langsung Agrinas.

Dalam rapat bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Joao mengatakan pemerintah kembali menegaskan

bahwa KDMP merupakan salah satu program strategis nasional.

"Koperasi Merah Putih adalah program strategis nasional. Intinya itu," katanya.

Meski demikian, Joao belum memerinci pembagian tugas Agrinas dengan kementerian maupun lembaga lain dalam pembangunan dan pengadaan kebutuhan koperasi. Ia juga belum mengungkapkan besaran anggaran yang akan dikelola perusahaan untuk menjalankan penugasan tersebut.

Saat ditanya mengenai model koperasi yang menjadi acuan pemerintah, apakah mengadopsi sistem di Jepang, Korea Selatan, atau India, Joao menegaskan bahwa KDMP mengusung model yang disesuaikan dengan karakter Indonesia. "Modelnya Pancasila. Bhinneka Tunggal Ika," ujarnya singkat. (tin,ist/dya)

SKEMA PENDANAAN KOPDES/ KELURAHAN MERAH PUTIH

Anggaran

- Rp240 triliun (6 tahun)
- Pinjaman bank Himbara

Pinjaman

- Maks. Rp3 miliar/koperasi
- Tenor 6 tahun
- Bunga 6%/tahun

Penggunaan

- Modal usaha
- Operasional awal
- Pembangunan gerai

Cicilan

- Ditanggung pemerintah
- Rp40 triliun/tahun (estimasi)
- Melalui Dana Desa
- Mulai September 2026

Syarat Subsidi

- Wajib lolos audit BPKP
- Gagal audit = cicilan tidak ditanggung

Dukungan

- Pelatihan
- Bantuan operasional
- Gaji pegawai 1-2 tahun awal

Peran Kopdes

- Pusat ekonomi desa
- Toko sembako & apotek
- Distribusi barang subsidi
- Penyalur bansos



Karena melibatkan banyak instansi, pemerintah menilai operasional KDMP tidak dapat diserahkan hanya kepada Kementerian Koperasi, melainkan membutuhkan dukungan penuh seluruh kementerian, lembaga, termasuk TNI dan Polri.

Pemerintah menargetkan sekitar 25.000 KDMP siap beroperasi pada Agustus hingga September. Jumlah tersebut akan terus bertambah hingga mencapai 35.862 unit pada akhir 2026. (wid,ist,ktn/dya)

HAKIM KABULKAN PERLAWANAN DR TIFA, **SIDANG KASUS IJAZAH JOKOWI DIHENTIKAN**

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur mengabulkan perlawanan atau eksepsi yang diajukan Tifauzia Tyassuma alias dr Tifa dalam perkara dugaan fitnah dan pencemaran nama baik terkait tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Putusan sela tersebut membuat surat dakwaan jaksa penuntut umum (JPU) dinyatakan batal demi hukum sehingga pemeriksaan perkara tidak dilanjutkan ke tahap pembuktian.

Putusan dibacakan dalam sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Kamis (23/7/2026), oleh majelis hakim yang diketuai Christina Endarwati dengan anggota Rudi Rafli Siregar dan Mathilda Chrystina Katarina.

Dalam amar putusannya, majelis hakim menerima perlawanan yang diajukan tim kuasa hukum terdakwa.

"Mengadili. Menyatakan perlawanan dari tim advokat terdakwa diterima. Menyatakan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara PDM-133/M.1.14/EOH.06/2026 tanggal 22 Juni 2026 atas nama terdakwa dr. Tifa Fauziah Suma batal demi hukum," ujar hakim saat membacakan putusan sela.

Majelis hakim juga memerintahkan agar berkas perkara dikembalikan kepada penuntut umum.

"Memerintahkan pengembalian berkas perkara kepada Penuntut Umum," ucap hakim.

Selain itu, majelis memutuskan biaya perkara dibebankan kepada negara.

Dakwaan Dinilai Tak Cermat

Dalam pertimbangannya, hakim menilai jaksa memiliki kewenangan menentukan pasal yang digunakan dalam dakwaan. Namun, dalam perkara ini penuntut umum menggunakan dua rezim hukum berbeda untuk mengatur delik yang sama, yakni pencemaran nama baik.

Pada dakwaan alternatif pertama subsider digunakan Pasal 433 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 atau KUHP baru, sedangkan dakwaan alternatif kedua subsider menggunakan Pasal 310 KUHP lama (Wetboek van Strafrecht).

Menurut majelis hakim, penggunaan dua rezim hukum berbeda dalam satu dakwaan alternatif justru menimbulkan ketidakpastian hukum.

"Apabila dua pasal yang mengatur delik yang sama ditempatkan secara alternatif dalam dua rezim hukum yang berbeda, maka hal tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum karena menunjukkan penuntut umum tidak dapat menentukan pilihan pasal yang akan didakwakan."

Majelis juga menilai perkara tersebut dilimpahkan ke pengadilan setelah KUHP baru berlaku, sehingga jaksa seharusnya telah menentukan



dr Tifa memberikan keterangan kepada awak media di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Diketahui eksepsinya dikabulkan dalam sidang putusan sela, Kamis (23/7/2026). (dok.ist)

secara tegas ketentuan hukum yang akan digunakan.

"Keragu-raguan dalam menentukan pasal yang didakwakan menunjukkan penuntut umum tidak cermat dalam menyusun surat dakwaan."

Hakim menegaskan bahwa surat dakwaan harus disusun secara cermat agar unsur-unsur tindak pidana dapat diuraikan secara tepat.

"Menimbang bahwa kecermatan dalam menyusun surat dakwaan diperlukan agar unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan undang-undang diuraikan secara tepat dan dihubungkan dengan fakta-fakta perbuatan yang didakwakan."

Majelis kemudian menyatakan keberatan yang diajukan tim kuasa hukum dr Tifa beralasan menurut hukum.

"Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, perlawanan tim advokat terdakwa mengenai surat dakwaan batal demi hukum beralasan hukum untuk dikabulkan."

Karena eksepsi diterima, pemeriksaan perkara tidak dapat dilanjutkan."Menimbang bahwa oleh karena perlawanan terdakwa diterima, pemeriksaan perkara ini tidak dapat dilanjutkan."

Majelis juga memerintahkan agar seluruh berkas perkara beserta barang bukti dikembalikan kepada jaksa penuntut umum.

"Menimbang bahwa oleh karena pemeriksaan perkara tidak dapat dilanjutkan, maka berkas perkara atas nama terdakwa dr. Tifauzia Tyassuma beserta seluruh barang bukti dikembalikan kepada penuntut umum."

Ketua Majelis Hakim Christina

Endarwati kembali menegaskan amar putusan."Menyatakan surat dakwaan penuntut umum nomor register perkara atas nama terdakwa Tifauzia Tyassuma batal demi hukum."

Ia juga menyampaikan konsekuensi hukum dari putusan tersebut."Menimbang bahwa oleh karena perlawanan advokat terdakwa diterima, maka pemeriksaan perkara ini tidak dapat dilanjutkan. Menimbang bahwa oleh karena tidak dapat dilanjutkan, maka berkas perkara atas nama terdakwa Tifa Fauziah Tyassuma beserta seluruh barang bukti harus dikembalikan kepada Penuntut Umum."

Roy Suryo Harap Jadi Yurisprudensi

Putusan sela tersebut mendapat apresiasi dari mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo yang hadir di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Roy menilai putusan hakim menjadi langkah positif dalam penanganan perkara yang berkaitan dengan dugaan ijazah palsu Jokowi.

"Bahwa hari ini, Kamis 23 Juli 2026 ya, Allah telah memberikan jalan terang, Allah telah memberikan langkah yang sangat bagus, dan memberikan petunjuk bagi hakim dan majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur dan semua perangkatnya untuk memutuskan yang paling baik. Putusan sela bagi sahabat saya, dr. Tifauzia," ujar Roy.

Roy juga memuji kerja tim kuasa hukum dr Tifa yang dinilai berhasil memenangkan putusan sela melalui argumentasi hukum dan pendekatan ilmiah.

"Meskipun awalnya tentang soalnya kompetensi relatif itu ditolak, tapi itu tidak masalah. Yang paling penting dagingnya ini. Dan ini

TIMELINE KASUS DR. TIFA

2022

- Polemik dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo mencuat. Dr. Tifa menganalisis foto digital ijazah yang beredar di media sosial.

November 2025

- Polda Metro Jaya menetapkan dr. Tifa sebagai tersangka dugaan penyebaran hoaks, fitnah, dan pencemaran nama baik.

21-24 Juni 2026

- Mengajukan praperadilan. Berkas dilimpahkan ke pengadilan, penangguhan penahanan dikabulkan, lalu praperadilan dicabut untuk fokus ke sidang pokok.

2 Juli 2026

- Sidang perdana. JPU membacakan dakwaan. Dr. Tifa menolak restorative justice dan mengajukan eksepsi.

9 Juli 2026

- Kuasa hukum membacakan eksepsi, meminta dakwaan dinyatakan tidak dapat diterima.

16 Juli 2026

- JPU meminta hakim menolak eksepsi dan melanjutkan sidang.

23 Juli 2026

- Majelis Hakim PN Jakarta Timur mengabulkan eksepsi. Surat dakwaan JPU dinyatakan batal demi hukum.

perkaranya berhenti."

Karena menghadapi perkara yang serupa, Roy berharap putusan tersebut dapat menjadi preseden bahkan yurisprudensi bagi perkara yang menjerat dirinya.

"Kalau memang hukum itu lurus, ya, ini tidak hanya menjadi preseden, tapi menjadi yurisprudensi. Jadi putusan dari dr. Tifauzia Tyassuma ini akan kemudian nanti harus berlaku juga untuk kemudian kasus saya," harapnya.

Dalam kesempatan itu, Roy juga membuka kemeja yang dikenakannya dan memperlihatkan kaus bergambar karikatur dr Tifa sebagai bentuk dukungan moral.

"Saya makanya pakai kaos ini, ini dr. Tifa dengan analisis geopolitiknnya, ya. Begitu. Jadi dr. Tifa akan terus berjuang, saya juga tetap akan berjuang. Terima kasih juga untuk semua teman-teman lawyer yang mungkin sekarang sudah tidak kebersamaan lagi juga ya, untuk tim yang lain. InsyaAllah kita tetap berjuang bersama."(gus,rls,sua/dya)

Penerimaan Pajak Reklame Kabupaten Malang Terpuruk



Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Malang, Made Arya Wedanthara. (foto: Prokopim Kab. Malang)

MALANG - Realisasi penerimaan pajak daerah Kabupaten Malang hingga minggu ketiga Juli 2026 mencapai Rp416,23 miliar atau 55,15 persen dari target tahunan sebesar Rp754,68 miliar. Sayangnya, pajak reklame justru masih terpuruk, dengan realisasi hanya 27,64 persen.

"Yang realisasinya masih belum maksimal itu ada pajak reklame, ini masih menjadi jenis pajak dengan capaian terendah. Per Senin kemarin, penerimaannya baru mencapai

Rp1,42 miliar atau 27,64 persen dari target Rp5,13 miliar," ujar Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Malang, Made Arya Wedanthara, Kamis (23/7/2026).

Dikatakannya, rendahnya realisasi pajak reklame diduga dipengaruhi oleh melemahnya aktivitas promosi perusahaan di tengah kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih hingga saat ini.

Menurut Made, pemerintah juga tidak memiliki kewenangan untuk mendorong perusahaan memasang reklame karena hal tersebut merupakan bagian dari strategi pemasaran masing-masing pelaku usaha.

"Kami tidak mungkin mengajak perusahaan untuk memasang reklame. Itu bagian dari strategi marketing masing-masing perusahaan. Kami hanya menyiapkan ruang, mekanisme perizinan, dan

besaran pajaknya," kata Made.

Ditambahkannya, perlambatan ekonomi membuat banyak pelaku usaha menahan belanja promosi. Di sisi lain, tren periklanan juga mulai bergeser ke platform digital yang dinilai lebih efisien dari sisi biaya maupun jangkauan.

"Mungkin saat ini kondisi ekonomi sedang lesu sehingga mereka belum banyak melakukan promosi. Kalau kondisi ekonomi semakin baik, saya meyakini penerimaan pajak reklame juga akan meningkat seiring aktivitas perdagangan yang kembali bergerak," ungkap Made.

Di sisi lain, Made juga merinci capaian dari sektor penerimaan pajak lainnya, yakni Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) Jasa Kesenian dan Hiburan yang menjadi penyumbang dengan persentase capaian tertinggi. Dari target Rp8,14 miliar, realisasinya telah mencapai Rp5,89 miliar atau 72,37 persen.

Di posisi berikutnya, PBJT Makanan dan Minuman (mamin) terealisasi sebesar Rp13,99 miliar atau 67,89 persen dari target Rp20,61 miliar. Sementara Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) mencatat

realisasi Rp582,63 juta atau 66,91 persen dari target Rp870,83 juta.

Penerimaan PBJT Tenaga Listrik, sambung Made, juga menunjukkan tren positif dengan realisasi Rp89,76 miliar atau 61,87 persen dari target Rp145,07 miliar. Adapun Pajak Air Tanah mencapai Rp4,39 miliar atau 61,21 persen dari target Rp7,16 miliar.

Untuk sektor Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), realisasi hingga 20 Juli telah mencapai Rp72,55 miliar atau 57,79 persen dari target Rp125,56 miliar. Sementara Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) membukukan penerimaan Rp35,96 miliar atau 55,55 persen dari target Rp64,74 miliar.

Pada sektor lainnya, PBJT Jasa Perhotelan terealisasi Rp4,49 miliar atau 54,25 persen dari target Rp8,28 miliar. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) mencapai Rp86,50 miliar atau 52,44 persen dari target Rp164,96 miliar.

Sedangkan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) baru terealisasi Rp99,78 miliar atau 49,25 persen dari target Rp202,58 miliar. (Santi/Dya)

Fokus Keluarga Prasejahtera, Pemkot Malang Salurkan Seragam Gratis ke 3.513 Siswa Baru

MALANG - Pemerintah Kota (Pemkot) Malang resmi menyalurkan bantuan seragam sekolah gratis kepada 3.513 siswa baru jenjang SD dan SMP pada tahun ajaran 2026/2027. Berbeda dengan tahun sebelumnya, program tersebut kini diprioritaskan bagi siswa yang berasal dari keluarga kurang mampu sebagai dampak kebijakan efisiensi anggaran.

"Karena ada kebijakan efisiensi anggaran, maka kami memprioritaskan siswa-siswi dari keluarga pra sejahtera. Mereka berasal dari desil 1 sampai 4 sesuai Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN)," ujar Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, Kamis (23/7/2026).

Dijelaskannya, penerima bantuan terdiri dari 2.013 siswa baru kelas 1 SD, baik negeri maupun swasta, serta 1.500 siswa baru kelas 7 SMP.

Menurut Wahyu, seluruh data penerima telah melalui proses verifikasi agar bantuan tepat sasaran. Berbeda dari tahun sebelumnya yang berupa kain seragam, tahun ini siswa menerima seragam yang sudah siap pakai.

"Karena penerimanya lebih diprioritaskan kepada keluarga pra sejahtera, maka kami memberikan langsung berupa seragam jadi. Ada dua stel, yakni seragam merah putih dan pramuka untuk SD, sedangkan SMP menerima seragam biru putih dan pramuka, lengkap dengan atributnya," katanya.

Perubahan skema tersebut juga berdampak pada besaran anggaran yang dialokasikan. Tahun ini Pemkot Malang menganggarkan sekitar Rp1,5 miliar untuk program seragam gratis, jauh lebih kecil dibandingkan tahun lalu yang mencapai sekitar Rp6 miliar.

"Pengurangan anggarannya memang cukup besar karena efisiensi. Tetapi kami tetap menjalankan program ini dengan menentukan skala prioritas. Kalau tahun lalu seluruh siswa baru kelas 1 dan kelas 7 mendapat bantuan, sekarang diprioritaskan bagi yang benar-benar membutuhkan," jelasnya.

Menanggapi anggapan sektor pendidikan seharusnya tidak terdampak efisiensi, Wahyu

menegaskan kebijakan penghematan berlaku di seluruh perangkat daerah. Namun, pemerintah tetap mempertahankan program seragam gratis dengan menyasar kelompok masyarakat yang paling membutuhkan.

"Namanya efisiensi, semua perangkat daerah mengalami pengurangan anggaran. Tetapi prioritas tetap kami berikan, salah satunya melalui bantuan seragam gratis bagi siswa dari keluarga pra sejahtera agar benar-benar tepat sasaran," tegasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Malang, Suwarjana mengatakan proses penetapan penerima dilakukan melalui pendataan di masing-masing sekolah setelah penerimaan peserta didik baru selesai.

Wali murid yang masuk kategori desil 1 hingga 4 diminta mengisi

Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat didampingi Kepala Disdikbud Kota Malang, Suwarjana, secara simbolis memberikan seragam gratis bagi siswa baru jenjang SMP dari keluarga pra sejahtera, Kamis (23/7/2026). (Santi/Lentera)



formulir sebagai dasar pengajuan bantuan. Data tersebut kemudian diverifikasi bersama Dinas Sosial sebelum seragam didistribusikan ke sekolah.

Suwarjana mengungkapkan, sebenarnya seluruh seragam telah selesai diproduksi sejak Juni 2026. Namun, distribusi baru dilakukan setelah proses pendataan dan sosialisasi kepada orang tua siswa mengenai mekanisme penyaluran bantuan. (Santi/Dya)



Para aktivis dan pendukung Cockroach Janta Party (CJP) bentrok dengan aparat kepolisian dalam aksi unjuk rasa yang menuntut pengunduran diri Menteri Pendidikan India, Dharmendra Pradhan, terkait dugaan penyimpangan dalam ujian NEET di New Delhi pada 20 Juli 2026. (AFP/Getty Images)

DEMO PARTAI KECOAK GUNCANG INDIA, BUNTUT KRISIS PENDIDIKAN DAN PENGANGGURAN

Gelombang demonstrasi yang dipimpin generasi Z (Gen Z) terus mengguncang ibu kota India, New Delhi. Aksi yang dipimpin gerakan Cockroach Janta Party (CJP) atau Partai Kecoak ini menuntut Menteri Pendidikan Dharmendra Pradhan mengundurkan diri. Mereka juga mendesak reformasi menyeluruh terhadap sistem pendidikan yang dinilai gagal menjawab tantangan generasi muda.

Demonstrasi yang berlangsung sejak pertengahan Juli itu bahkan disebut sebagai salah satu aksi terbesar yang dihadapi pemerintahan Perdana Menteri Narendra Modi di New Delhi dalam beberapa tahun terakhir.

Awalnya, CJP bukanlah partai politik, melainkan gerakan yang dibentuk oleh ahli strategi komunikasi politik berusia 30 tahun sekaligus alumnus Boston University, Abhijeet Dipke. Ia mengaku tidak pernah membayangkan gerakan yang berawal dari sebuah lelucon di internet akan berkembang menjadi aksi massa berskala nasional.

"Saya berpikir kita seharusnya berkumpul bersama, mungkin memulai sebuah platform," kata Dipke kepada BBC dikutip Kamis (23/7/2026).

Gagasan sederhana tersebut ternyata mendapat sambutan luar biasa. Setelah membuka formulir pendaftaran melalui Google Form, puluhan ribu orang menyatakan bergabung. Momentum itu membuat CJP berubah dari gerakan satir menjadi wadah protes yang serius. Pada 9 Juli, kelompok tersebut mengumumkan rencana aksi menuju parlemen yang digelar pada 20 Juli.

Puluhan ribu orang menghadiri demonstrasi di Delhi. Aksi solidaritas juga berlangsung di sejumlah kota lain seperti Mumbai, Bengaluru, hingga Goa melalui unjuk rasa maupun doa bersama menggunakan lilin.

Dipicu Kebocoran Soal Ujian Kedokteran

Pemicu utama kemarahan

mahasiswa adalah skandal National Eligibility cum Entrance Test (NEET), ujian nasional masuk fakultas kedokteran yang diikuti sekitar 2,28 juta peserta pada 3 Mei 2026.

Setelah jutaan peserta mempersiapkan diri selama berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun, ujian tersebut dibatalkan menyusul dugaan kebocoran soal.

Para peserta akhirnya diwajibkan mengikuti ujian ulang di bawah pengamanan ketat.

Peristiwa tersebut memicu kemarahan luas karena dianggap mencerminkan lemahnya tata kelola pendidikan India.

CJP bahkan menyebut sekitar 20 mahasiswa meninggal akibat bunuh diri setelah pembatalan ujian tersebut, meski klaim tersebut masih menjadi tuduhan yang disuarakan gerakan bersama sejumlah keluarga korban.

Kontroversi NEET sendiri bukan pertama kali terjadi. Sistem ujian tersebut juga sempat menuai polemik pada 2024.

Karena itu, tuntutan demonstran berkembang dari sekadar pembatalan hasil ujian menjadi reformasi menyeluruh terhadap sistem pendidikan nasional.

Nama "Cockroach Janta Party" memiliki latar belakang yang tidak biasa.

Istilah itu muncul setelah Ketua Mahkamah Agung India Surya Kant, dalam persidangan pada Mei lalu, dinilai menyamakan anak muda pengangguran yang beralih ke dunia jurnalisme dan aktivisme dengan

kecoak serta parasit.

Belakangan Surya Kant memberikan klarifikasi bahwa pernyataannya sebenarnya ditujukan kepada orang-orang yang memiliki "gelar palsu dan tidak sah", bukan kepada generasi muda India secara umum.

Namun penjelasan tersebut datang ketika kutipan pernyataannya telah lebih dahulu viral di media sosial dan memicu kemarahan publik.

Alih-alih tersinggung, para aktivis justru mengadopsi istilah "kecoak" sebagai identitas gerakan.

Nama itu sekaligus menjadi plesetan dari Bharatiya Janata Party (BJP), partai yang dipimpin Perdana Menteri Narendra Modi.

Para relawan CJP bahkan kerap hadir dalam berbagai aksi sosial maupun demonstrasi dengan mengenakan kostum kecoak sebagai simbol bahwa mereka mampu bertahan menghadapi tekanan.

Perhatian publik terhadap demonstrasi semakin besar setelah insinyur sekaligus aktivis lingkungan Sonam Wangchuk ikut bergabung.

Pria berusia 59 tahun itu memulai aksi mogok makan sejak 28 Juni di kawasan Jantar Mantar, lokasi yang selama ini menjadi pusat demonstrasi di New Delhi.

Namun pada 18 Juli, aparat membawa Wangchuk secara paksa ke rumah sakit.

Seorang pengunjuk rasa mengenakan topeng kecoak di Mumbai, India. (getty)

Tindakan tersebut justru memicu kemarahan publik dan memperluas dukungan terhadap gerakan mahasiswa.

Meski dirawat di rumah sakit, Wangchuk tetap melanjutkan aksi mogok makannya.

Setelah Wangchuk dibawa ke rumah sakit, pendiri CJP Abhijeet Dipke ikut melakukan aksi mogok makan sebelum akhirnya menghentikan puasanya pada 20 Juli setelah mendapat seruan dari para pendukung.

Bentrokan dengan aparat

Demonstrasi mencapai puncaknya pada 20 Juli ketika massa berusuk menuju kawasan parlemen.

Polisi membubarkan aksi menggunakan pentungan dan gas air mata setelah demonstran mencoba menembus barikade keamanan.

Aparat juga membongkar panggung dan tenda yang didirikan di kawasan Jantar Mantar.

Akibat bentrokan tersebut, sedikitnya 60 demonstran mengalami luka-luka dan sekitar 70 orang ditahan.

Di sisi lain, kepolisian India mengklaim sebanyak 118 personelnya turut mengalami cedera dalam keributan tersebut.

Meski demikian, massa tetap bertahan di lokasi demonstrasi, menghadapi hujan maupun cuaca panas dan kelembapan tinggi khas Delhi.

Sehari setelah bentrokan, Partai Kongres sebagai oposisi utama India ikut menggelar demonstrasi di depan kediaman Perdana Menteri Narendra Modi.

Pemimpin oposisi Rahul Gandhi mengatakan aksi dilakukan karena mereka tidak diberi kesempatan membahas persoalan tersebut di parlemen. (gus,bbc,ist/dya)



Bahaya Kesehatan Intai Tradisi Kuliner dengan **Telur Mentah**

Telur merupakan salah satu bahan pangan hewani yang paling populer dan kaya akan nutrisi. Tinggi protein, vitamin, serta mineral, telur kerap diposisikan sebagai makanan praktis penyokong energi harian.

Meski demikian, kebiasaan mengonsumsi telur dalam kondisi mentah maupun setengah matang masih ada perdebatan panjang mengenai aspek keamanan pangannya. Di balik kenikmatan teksturnya, terdapat ancaman kesehatan laten yang patut diwaspadai. Diketahui, telur mentah sering digunakan pada campuran jamu tradisional, saus salad, hingga hidangan sunny-side up.

Bahaya paling utama dari konsumsi telur mentah atau setengah matang adalah risiko paparan bakteri *Salmonella enteritidis*. Bakteri patogen ini dapat mencemari telur sejak masih berada dalam organ reproduksi ayam sebelum cangkang terbentuk sempurna, maupun melalui kontaminasi silang dari kotoran yang menempel pada cangkang.

Merujuk pada laporan NDTV Food, para ahli mengingatkan bahwa mengonsumsi telur yang tidak dimasak hingga matang sempurna memiliki risiko kesehatan yang signifikan, terutama jika telur terkontaminasi bakteri. Penyakit yang diakibatkan oleh infeksi ini dikenal sebagai salmonellosis atau keracunan makanan berat.

Lembaga pengawas kesehatan global juga memberikan perhatian serius terhadap kebiasaan ini.

Centers for Disease Control and Prevention (CDC) Amerika Serikat secara konsisten menegaskan bahwa *Salmonella* dapat berada di dalam telur yang terlihat sangat bersih dan utuh sekalipun. CDC memperkirakan bahwa infeksi *Salmonella* menyebabkan sekitar 1,35 juta kasus penyakit, 26.500 rawat inap, dan 420 kematian di Amerika Serikat setiap tahunnya, di mana makanan, termasuk telur mentah, menjadi salah satu sumber penularan utamanya.

Gejala umum yang dialami penderita meliputi mual, muntah hebat, diare, nyeri atau kram perut, demam tinggi, serta tubuh lemas dan menggigil. Gejala tersebut biasanya mulai bermanifestasi dalam rentang waktu 12 hingga 36 jam setelah mengonsumsi makanan yang terkontaminasi dan dapat berlangsung selama beberapa hari hingga satu minggu.

Dampak infeksi *Salmonella* tidak sama bagi setiap individu. Bagi orang dewasa dengan kondisi fisik prima, gejala mungkin dapat mereda seiring waktu dengan penanganan medis yang tepat. Namun, infeksi ini berpotensi memicu komplikasi fatal bagi kelompok populasi yang rentan.

4 Kelompok Paling Rentan

Food and Drug Administration (FDA) mengategorikan empat kelompok utama yang paling berisiko tinggi saat mengonsumsi telur mentah, yaitu anak-anak dan balita, lansia, ibu

hamil, serta individu dengan daya tahan tubuh lemah (immunocompromised). Pada anak-anak, daya tahan tubuh yang belum matang membuat mereka rentan mengalami dehidrasi berat akibat diare.

Pada lansia, paparan bakteri meningkatkan risiko penyebaran infeksi ke aliran darah (bakteremia). Sementara bagi ibu hamil, infeksi *Salmonella* dapat memicu kram uterus hebat yang berisiko menyebabkan kelahiran prematur hingga komplikasi serius pada janin.

Di samping ancaman bakteri, terdapat mitos populer yang menganggap telur mentah mengandung gizi yang lebih tinggi dan protein yang lebih murni dibandingkan telur matang. Secara medis, anggapan ini keliru.

Penelitian yang dipublikasikan dalam *Journal of Nutrition* menunjukkan bahwa proses pemanasan saat memasak justru membantu mendenaturasi protein telur, sehingga struktur molekulnya lebih mudah diurai oleh enzim pencernaan manusia.

Studi tersebut mencatat bahwa tubuh manusia mampu menyerap hingga 90% protein dari telur yang dimasak matang, dibandingkan hanya sekitar 50% hingga 60% pada telur mentah. Selain itu, telur mentah mengandung protein bernama avidin, yang jika dikonsumsi secara berlebihan dapat mengikat biotin (vitamin B7) di dalam saluran pencernaan dan mencegah penyerapannya oleh tubuh. Untuk tetap memperoleh manfaat gizi telur secara optimal tanpa mengorbankan

faktor keselamatan, penerapannya dapat disiasati melalui manajemen kebersihan pangan yang tepat. Langkah utama adalah memilih telur dengan cangkang bersih, mulus, dan tidak retak, serta menyimpannya di dalam lemari pendingin pada suhu di bawah 4°C untuk menekan laju perkembangbiakan bakteri. (farist/dya)

Kuliner Populer Indonesia & Dunia yang Menggunakan Telur Mentah/Setengah Matang

STMJ (Susu Telur Madu Jahe-Indonesia)

Fungsi: Minuman tradisional penambah stamina dan kebugaran tubuh.

Sukiyaki & Shabu-Shabu (Jepang)

Fungsi: Memperlunakkan tekstur daging dan mendinginkannya secara instan sebelum dimakan.

Tamago Kake Gohan (Jepang)

Fungsi: Makanan praktis bergizi tinggi khas masyarakat Jepang.

Spaghetti Carbonara Otentik (Italia)

Fungsi: Menciptakan emulsi saus yang kental dan gurih tanpa menggunakan krim (heavy cream).

Steak Tartare (Prancis)

Fungsi: Memberikan kelembutan dan rasa gurih yang kaya pada olahan daging segar.

Mayones Rumahan & Saus Hollandaise (Prancis/Eropa)

Fungsi: Saus dasar (mother sauce) populer untuk hidangan salad, burger, dan Eggs Benedict.



China Perketat AI Companion, Batasi Hubungan Emosional Manusia dengan Chatbot



Pemerintah China resmi memperketat pengawasan terhadap layanan AI companion atau chatbot pendamping melalui regulasi baru yang mulai berlaku pada pertengahan Juli 2026. Aturan tersebut mewajibkan penyedia layanan mencegah ketergantungan emosional pengguna, membatasi penggunaan berlebihan, hingga melakukan intervensi ketika terdeteksi risiko psikologis.

Kebijakan ini sekaligus menjadi langkah pertama China yang secara khusus mengatur layanan AI

antropomorfik, yakni kecerdasan buatan yang dirancang membangun hubungan emosional layaknya manusia.

Regulasi tersebut disusun bersama oleh Cyberspace Administration of China (CAC) dan empat lembaga pemerintah lainnya. Aturan berlaku untuk layanan AI yang menyediakan "interaksi emosional berkelanjutan" melalui teks, gambar, suara, maupun video, namun tidak mencakup AI yang digunakan untuk layanan pelanggan, pekerjaan, pendidikan, maupun riset.

Aturan baru itu juga menjadi dasar bagi sejumlah perusahaan teknologi, seperti ByteDance dan Alibaba, untuk menyesuaikan layanan chatbot mereka.

Platform AI populer Doubao milik ByteDance, misalnya, menonaktifkan fitur custom persona yang memungkinkan pengguna menciptakan karakter AI dan menjalin hubungan emosional dengannya.

Pemerintah China menilai AI companion membawa manfaat di berbagai sektor, mulai dari layanan

pelanggan, kesehatan mental, pengasuhan anak, hingga pendamping lansia. Namun, meningkatnya penggunaan chatbot sebagai teman maupun pasangan virtual juga memunculkan kekhawatiran baru.

Melalui regulasi tersebut, penyedia layanan diwajibkan mampu mendeteksi tekanan emosional pengguna, melakukan intervensi ketika terjadi krisis, membatasi penggunaan secara berlebihan, serta memastikan pengguna memiliki kendali penuh atas data pribadi mereka.

Platform juga dilarang merancang sistem yang mendorong perilaku adiktif. Apabila pengguna menggunakan layanan lebih dari dua jam tanpa henti, sistem harus memberikan peringatan. Ketika terdeteksi tanda-tanda ketergantungan emosional, AI wajib menampilkan peringatan dan menjalankan mekanisme intervensi.

Associate Professor University of Chinese Academy of Social Sciences, Liu Xiaochun, mengatakan AI perlu mengingatkan pengguna bahwa hubungan yang terjalin bersifat virtual.

"Ketika pengguna mulai mencampurkan hubungan emosional virtual dengan hubungan nyata, sistem seharusnya memberikan peringatan bahwa lawan bicaranya adalah mesin, bukan manusia," ujarnya.

Ia juga menilai pengguna perlu didorong kembali membangun komunikasi dengan keluarga maupun teman di dunia nyata. Langkah pemerintah tidak lepas dari meningkatnya popularitas AI companion di China, terutama di kalangan generasi muda. **(farist/dya)**



HARIAN
LENTERA
Inspirasi Perubahan **TODAY**

HARIAN "LENTERA TODAY"
PIMPINAN PERUSAHAAN TARMUJI TALMACSI
OMBUDSMAN SUKARJITO (ID Sertifikasi 14319)
PENANGGUNG JAWAB ARIFIN B.H (ID Sertifikasi 13043)
PIMPINAN REDAKSI ARIFIN B.H (ID Sertifikasi 13043)
REDAKTUR PELAKSANA AGUSTINA WIDYAWATI (ID Sertifikasi 2567)
REDAKTUR LUTFIYU HANDI, ARIEF SUKAPUTRA, MUHIBUDIN KAMALI

KORAN DIGITAL LENTERA TODAY
Terbit Senin - Jumat (12 Halaman)
download edisi digital pada web
www.lenteratoday.com
VERIFIKASI FAKTUAL DEWAN PERS
803/DP-Verifikasi/K/X/2021



MEDIA TERVERIFIKASI

BIRO: SURABAYA: YOLANDA APRILLIA PRADITHA, AMANAH NUR ASIAH, JOKO PRASETYO I SIDOARJO: TEGUH A I GRESIK: ASEPTA YOGA P. (SERTIFIKASI WARTAWAN UTAMA) I MOJOKERTO: NUR HIDAYAH I LAMONGAN: L HANDI I BLITAR: ARIEF SUKAPUTRA I KEDIRI: AIS I JOMBANG : SUTONO I PASURUAN-PROBOLINGGO- PONOROGO : IMAN SANTOSO I BONDOWOSO- SITUBONDO-LUMAJANG-JEMBER-BANYUWANGI: PURCAHYONO JULIATMOKO I MADIUN: WIWIET EKO PRASETYO (SERTIFIKASI WARTAWAN MUDA) I MALANG RAYA: SANTI WAHYU SANIA (SERTIFIKASI WARTAWAN MUDA), ISKANDAR Z. I TRENGGALEK: HERLAMBAANG I MADURA RAYA: SAHLAN KURNIAWAN I NGAWI: DIMAS RIDHO SURYO BASKORO I DKI JAKARTA: FUAD HASSAN I LOMBOK BARAT: MUHAYYAN I PALANGKA RAYA: NOVITA MASNIARI

PENASEHAT HUKUM DR. NURIYANTO A. DAIM, SH, MH I MARKETING COMMUNICATION JOKO PRASETYO UTOMO, ISKANDAR ZULKARNAIN I SEKERTARIS FITRIYANTI SUTAN, FARADITA NUR FADHILA DESAIN GRAFIS PAULUS IVAN, FADHILA I ALAMAT REDAKSI JL RUNGKUT ASRI UTARA VI/26, JL TENGGILIS TENGAH 4 I TELP 03187854491 I PENERBIT PT MEDIA HEBAT INSPIRASI INDONESIA I ALAMAT PERCETAKAN SMILE GRAFIKA JL. RAYA KALIRUNGKUT 42 SURABAYA I TELP IKLAN 031-87854491 I NIB 91205006801134 I HARGA IKLAN RP 25.000 MM/KOLOM

Wartawan Lentera Today dalam setiap bertugas dilengkapi dengan tanda pengenal wartawan/kartu pers yang dikeluarkan perusahaan secara sah. Nama pemegang tanda pengenal wartawan/kartu pers Lentera Today tercantum di Box Redaksi. Siapa pun yang mengaku/mengatasnamakan Lentera Today, tanpa bisa menunjukkan surat/kartu tanda pengenal atau namanya tidak tercantum dalam Kotak Redaksi, agar ditolak/ dikonfirmasi/dilaporkan ke manajemen redaksi/perusahaan atau melalui nomor telepon yang tertera di Kotak Redaksi. Dalam melaksanakan tugas jurnalistik, setiap wartawan Lentera Today dilarang menerima dan/atau meminta apa pun dengan alasan apa pun.

Kaus Kaki dan Loafers, Duet Klasik yang Jadi Tren Lagi

Loafers kembali menguasai tren alas kaki pada 2026. Sepatu yang dulu identik dengan gaya preppy, seragam sekolah, hingga busana kerja kini tampil lebih fleksibel. Mulai dipadukan dengan jeans longgar, rok mini, gaun feminin, hingga celana pendek. Yang paling menarik, aturan lama yang menganggap loafers harus dipakai tanpa kaus kaki kini mulai ditinggalkan.

Sebaliknya, kaus kaki justru menjadi bagian penting dari keseluruhan penampilan. Mulai dari crew socks bergaris, kaus kaki renda, hingga model transparan, semuanya dipakai untuk memberi karakter sekaligus mempertegas siluet outfit. Tren ini banyak terlihat di runway, street style, hingga dikenakan sejumlah selebritas dunia.

Selain membuat tampilan lebih menarik, memakai kaus kaki bersama loafers juga memiliki manfaat praktis. Kaus kaki membantu menyerap keringat, mengurangi gesekan yang menyebabkan lecet, menjaga sepatu tetap higienis, sekaligus memperpanjang usia pakai kulit atau suede pada loafers. Para editor mode bahkan menyebut era "sockless loafers" mulai bergeser menuju gaya yang lebih nyaman dan proporsional.

Lantas bagaimana memadukan loafers dengan kaus kaki agar tetap terlihat modis? Berikut beberapa inspirasi yang bisa dicoba.

Crew Socks, Pilihan Timeless

Bagi yang baru mencoba tren ini, crew socks menjadi pilihan paling mudah. Panjang kaus kaki yang berada di pertengahan betis mampu menciptakan transisi yang rapi antara celana dan sepatu sehingga penampilan terlihat lebih seimbang.

Untuk loafers dengan sol tebal atau chunky, pilih kaus kaki berbahan agak tebal agar proporsinya serasi. Sebaliknya, loafers model ramping seperti penny loafers akan terlihat lebih elegan bila dipadukan dengan kaus kaki berbahan tipis.

Warna netral seperti hitam, putih, abu-abu, krem, hingga cokelat muda menjadi pilihan yang paling mudah dipadukan dengan berbagai outfit. Jika ingin memberikan efek kaki tampak lebih jenjang, samakan warna kaus kaki dengan warna celana, bukan warna sepatu. Teknik sederhana ini banyak digunakan stylist karena membuat garis kaki terlihat lebih panjang.

Aksen Warna

Kaus kaki kini bukan lagi sekadar pelengkap, tetapi juga aksesoris fashion.

Warna merah marun, hijau zaitun, biru navy, mustard, hingga burgundy menjadi pilihan yang banyak muncul dalam gaya street style. Warna-warna tersebut mampu menjadi titik fokus tanpa membuat keseluruhan outfit terlihat berlebihan.

Cara paling aman adalah mengambil warna yang sudah ada pada elemen lain, misalnya tas, syal, topi, blazer, atau motif rok. Dengan begitu keseluruhan tampilan terasa menyatu. Sebaliknya, bila mengenakan outfit monokrom, kaus kaki berwarna kontras dapat menjadi statement yang membuat gaya terlihat lebih hidup. Tren ini juga banyak muncul pada gaya preppy modern yang kembali populer sepanjang 2026.

Kaus Kaki Renda dan Transparan

Loafers dikenal memiliki kesan maskulin. Namun karakter tersebut



bisa dilembutkan dengan memilih kaus kaki berbahan lace, sheer, tulle, atau transparan.

Model ini menjadi favorit karena mampu memberikan tekstur tanpa membuat tampilan terasa berat. Padanan tersebut cocok dikenakan bersama rok lipit, dress pendek, maupun midi skirt sehingga menghasilkan perpaduan antara gaya klasik dan feminin. Alternatif lain adalah menggunakan kaus kaki dengan detail bordir, pita kecil, mutiara, atau manik-manik. Detail sederhana tersebut mampu memberi sentuhan manis tanpa menghilangkan kesan elegan.

Perhatikan Ketebalan

Salah satu kesalahan yang paling sering dilakukan adalah mencampurkan loafers ramping dengan kaus kaki olahraga yang terlalu tebal.

Editor GQ menyarankan memilih ketebalan kaus kaki sesuai bentuk sepatu. Loafers klasik dengan desain ramping lebih cocok dipadukan dengan kaus kaki halus berbahan katun atau wol tipis. Sementara chunky loafers dan lug sole loafers justru terlihat lebih seimbang bila menggunakan ribbed socks yang sedikit lebih tebal.

Selain tampilan, pemilihan bahan juga penting. Katun tipis cocok dipakai di cuaca hangat karena lebih mudah menyerap keringat, sedangkan wol merino menjadi pilihan nyaman saat suhu lebih dingin karena mampu mengatur kelembapan sekaligus mengurangi bau.

Sesuaikan Jenis Outfit

Kombinasi loafers dan kaus kaki sangat fleksibel sehingga bisa dipakai di berbagai kesempatan. Untuk gaya formal atau semi formal, gunakan loafers kulit hitam atau cokelat dengan celana bahan dan kaus kaki berwarna senada. Hindari motif terlalu ramai agar kesan profesional tetap terjaga.

Jika ingin tampil kasual, loafers dapat dipadukan dengan jeans lurus, oversized jeans, maupun celana pendek. Kaus kaki putih bertekstur rib menjadi pilihan yang paling banyak digunakan dalam gaya streetwear karena memberikan nuansa preppy yang santai namun tetap rapi.

Sementara itu, bagi penyuka gaya feminin, loafers juga cocok dipadukan dengan mini skirt, rok lipit, atau gaun sederhana. Perpaduan ini menciptakan keseimbangan antara siluet yang lembut dengan karakter sepatu yang lebih tegas. (far,ist/dya)



Sah! Konsumen Berhak ...dari Hal 1

Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian permohonan pengujian materiil terkait aturan tarif telekomunikasi dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.

Perkara tersebut diajukan oleh tiga warga negara, yakni Didi Supandi, Wahyu Triana Sari, dan Rega Felix, yang didampingi kuasa hukum Viktor Santoso Tandiasa. Para pemohon menggugat ketentuan mengenai tarif penyelenggaraan jasa telekomunikasi karena dinilai tidak memberikan perlindungan hukum terhadap sisa kuota internet yang telah dibayar konsumen, tetapi hangus ketika masa berlaku paket berakhir.

Mereka berpendapat, selama ini penyelenggara telekomunikasi memiliki keleluasaan menentukan syarat dan ketentuan layanan melalui perjanjian baku yang mengakibatkan konsumen kehilangan hak atas kuota yang telah dibeli tanpa memiliki ruang untuk menegosiasikan isi perjanjian tersebut.

"Ketentuan norma Pasal 71 angka 2 Cipta Kerja telah memberikan cek kosong kepada operator untuk menetapkan skema kuota hangus tanpa adanya kewajiban akumulasi kepada konsumen. Hal ini menciptakan ketidakpastian hukum bagi pengguna jasa telekomunikasi selaku konsumen karena mereka tidak pernah tahu pasti mengapa komoditas data yang sudah dibayar lunas bisa hilang hanya karena variabel waktu yang ditentukan secara sepihak," papar kuasa hukum para pemohon, Viktor Santoso Tandiasa.

MK: Hak Konsumen Harus Dijamin

Dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah menilai hubungan hukum antara operator dan pelanggan dibangun melalui perjanjian baku yang pada praktiknya tidak memberikan posisi tawar yang seimbang kepada konsumen. Karena itu, persetujuan pengguna terhadap syarat dan ketentuan layanan tidak dapat dimaknai sebagai persetujuan tanpa batas terhadap seluruh klausul yang ditetapkan sepihak oleh penyelenggara jasa telekomunikasi.

Mahkamah menyatakan praktik penghangusan sisa kuota internet tanpa adanya pilihan perlindungan bagi konsumen merupakan bentuk penyalahgunaan keadaan (misbruik van omstandigheden). Penilaian tersebut menjadi bagian dari pertimbangan hukum Mahkamah dalam menguji konstitusionalitas norma yang dipersoalkan.

MK juga menegaskan bahwa perlindungan terhadap sisa kuota internet yang telah dibeli pengguna merupakan bagian dari perlindungan hak milik sebagaimana dijamin Pasal

28H ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

"Berdasarkan prinsip kepatutan, hal tersebut harus dinyatakan sebagai bentuk pengingkaran atau penyalahgunaan keadaan (misbruik van omstandigheden)," demikian pertimbangan Mahkamah.

Dalam sidang pembacaan putusan, Hakim Konstitusi Adies Kadir mengatakan negara memiliki kewajiban memberikan perlindungan terhadap hak pengguna jasa telekomunikasi atas kuota internet yang telah diperoleh.

"Secara riil kuota yang belum sepenuhnya digunakan atau dinikmati harus tetap dilindungi sebagai hak milik pengguna jasa telekomunikasi untuk dapat dipergunakan hingga kuota itu habis tanpa dibebani biaya atau tarif tambahan dengan dalih perpanjangan masa aktif atau dengan alasan apa pun," ujar Adies.

Ia melanjutkan, perlindungan terhadap hak pengguna jasa telekomunikasi atas kuota internet yang telah diperoleh merupakan wujud perlindungan terhadap hak milik pribadi yang tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang sebagaimana dijamin Pasal 28H ayat (4) UUD 1945.

Norma Diubah Bersyarat

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Ketua MK Suhartoyo membacakan amar putusan yang menyatakan Pasal 28 ayat (1) sebagaimana diubah melalui Pasal 71 angka 2 Lampiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai bahwa penyelenggara telekomunikasi wajib menyediakan pilihan layanan yang menjamin sisa kuota milik pengguna jasa telekomunikasi tetap aktif dan dapat digunakan.

Norma tersebut selanjutnya dimaknai sebagai berikut: "Besaran tarif penyelenggaraan jaringan telekomunikasi dan/atau penyelenggaraan jasa telekomunikasi ditetapkan oleh penyelenggara jaringan telekomunikasi dan/atau jasa telekomunikasi berdasarkan formula yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dengan kewajiban menyediakan pilihan layanan jasa telekomunikasi yang menjamin sisa kuota milik pengguna jasa telekomunikasi tetap aktif dan dapat digunakan."

Dengan putusan tersebut, MK tidak menentukan satu model layanan tertentu yang wajib diterapkan seluruh operator. Mahkamah hanya mewajibkan penyelenggara telekomunikasi menyediakan pilihan layanan yang memberikan perlindungan terhadap

sisa kuota internet milik pengguna.

Putusan MK mendapat apresiasi dari Anggota Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) Heru Sutadi yang hadir sebagai pihak terkait dalam persidangan.

Menurut Heru, putusan tersebut memperkuat posisi konsumen tanpa harus menghambat inovasi industri telekomunikasi.

"Kita mengapresiasi Putusan MK Nomor 273/PUU-XXIII/2025 karena memperkuat perlindungan hak konsumen. Sebagai Anggota BPKN yang menjadi pihak terkait dalam perkara ini, saya juga telah menyampaikan keterangan di persidangan bahwa operator telekomunikasi perlu menyediakan pilihan layanan internet, baik yang bersifat limitatif (berbasis kuota) maupun non-limitatif (unlimited)," ujar Heru.

Ia menilai kuota yang telah dibeli menggunakan uang konsumen semestinya tidak hangus secara sepihak.

"Apabila konsumen memilih layanan berbasis kuota, maka kuota yang telah dibeli dengan uang konsumen tidak seharusnya dihanguskan secara sepihak. Harus tersedia mekanisme yang adil, seperti rollover, refund, atau skema lain yang melindungi hak konsumen," katanya.

Heru juga menepis anggapan bahwa mekanisme perlindungan sisa kuota akan membebani operator.

"Dampaknya tidak perlu dikhawatirkan secara berlebihan. Rollover kuota tidak berkaitan langsung dengan tingginya biaya operasional atau pembangunan jaringan di wilayah 3T. Ini hanya menyangkut waktu penggunaan kuota yang telah dibayar konsumen. Beberapa operator telah lebih dulu menerapkan layanan rollover dan tetap mampu menjalankan bisnisnya dengan baik," ujarnya.

Ia menambahkan, implementasi putusan MK dapat dilakukan melalui berbagai pilihan layanan, seperti akumulasi (rollover) kuota, perpanjangan masa aktif, kompensasi, pengembalian manfaat (refund), maupun bentuk perlindungan lain sepanjang tetap menjamin hak konsumen. Namun, bentuk layanan tersebut merupakan pilihan implementasi yang dapat dikembangkan oleh operator dan bukan model yang secara spesifik diwajibkan dalam amar putusan MK.

Di luar pertimbangan hukum MK, putusan tersebut diperkirakan akan berdampak luas mengingat tingginya penggunaan layanan internet seluler di Indonesia.

Berdasarkan Survei Profil Internet Indonesia 2026 yang dirilis Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), jumlah pengguna internet di Indonesia telah mencapai 235.261.078 jiwa atau sekitar 81,72 persen dari total populasi nasional.

PETA PERSAINGAN OPERATOR & ISP

Internet Seluler (Mobile)

- Telkomsel: 37,9% market share.
- Indosat Ooredoo Hutchison: 35,5% market share.
- Faktor Pilihan Utama: Sinyal kuat & jaringan stabil (47,4%), bukan lagi sekadar harga murah.

Internet Rumah (Fixed Broadband)

- Penetrasi Wi-Fi Rumah: 57,7% rumah tangga.
- IndiHome: Memimpin pasar dengan 47,3%.

ANCAMAN SIBER & FITUR YANG PALING DIBUTUHKAN

Pengguna menuntut Penyedia Jasa Internet (ISP) menyediakan 3 fitur keamanan bawaan:

- Anti-Penipuan Online/Scam (24,0%)
- Anti-Judi Online (21,7%)
- Filter Anti-Pornografi (20,5%)



Ketua Umum APJII Muhammad Arif mengatakan internet telah menjadi kebutuhan dasar masyarakat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.

"Internet saat ini bukan lagi sekadar kebutuhan tambahan, tetapi telah menjadi bagian dari aktivitas sosial, ekonomi, pendidikan, hingga pelayanan publik masyarakat Indonesia," ujarnya.

Survei tersebut juga menunjukkan bahwa 84,31 persen masyarakat mengakses internet melalui telepon pintar, sementara kelompok Generasi Z, milenial, dan masyarakat usia produktif menjadi pengguna layanan data seluler terbesar.

Di sisi lain, sebanyak 17,2 persen masyarakat yang belum terkoneksi internet masih menilai harga paket data relatif mahal.

Data juga menyebut, sebanyak 52,27% pengguna menghabiskan Rp101.000-Rp250.000, sementara kelompok pengeluaran di bawah Rp50.000 mencapai 34,52%.

Besarnya jumlah pengguna internet menunjukkan bahwa putusan MK berpotensi memberikan dampak terhadap perlindungan hak ekonomi ratusan juta konsumen layanan telekomunikasi di Indonesia. Meski demikian, putusan tersebut tidak serta-merta menghapus sistem masa berlaku paket internet yang selama ini diterapkan operator. (wid,rls,kum,kcm/dya)

SEPEKAN JADI PENGACARA FEBRIE: BERALASAN SAKIT HOTMAN PARIS MENGUNDURKAN DIRI

Pengacara senior Hotman Paris Hutapea memutuskan mengundurkan diri dari tim kuasa hukum mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah. Keputusan itu diambil hanya sekitar sepekan setelah Hotman secara resmi menerima surat kuasa dan menyatakan bersedia mendampingi Febrie yang kini berstatus tersangka dalam perkara dugaan korupsi. Hotman menegaskan pengunduran dirinya tidak berkaitan dengan substansi perkara yang sedang dihadapi Febrie. Menurutnya, keputusan tersebut murni didasari kondisi kesehatan yang memburuk dan dikhawatirkan akan semakin parah apabila tetap memaksakan diri bekerja.

Dalam konferensi pers di Rumah Sakit Medistra, Jakarta, Kamis (23/7/2026), Hotman mengungkapkan bahwa ia telah lebih dulu menyampaikan keputusan itu kepada Febrie.

"Atas pertimbangan kesehatan itulah, sudah dari dua hari lalu sudah kasih tahu ke klien saya yang sekarang jadi mantan, Febrie Jampidsus, (bahwa) saya mengundurkan diri," kata Hotman.

Ia menjelaskan, komunikasi tersebut sebenarnya telah dilakukan dua hari sebelumnya. Namun, Febrie sempat memintanya untuk tetap bertahan beberapa hari lagi.

"Sudah ngomong dari 2 hari lalu tapi beliau mengimbau kalau bisa beberapa hari lagi. Tapi kalau otak saya terus mikir dan badan begini aku takut makin parah ya," sambungnya.

Hotman menekankan bahwa alasan pengunduran dirinya sepenuhnya disebabkan faktor kesehatan. Hal itu juga telah ia sampaikan secara langsung kepada mantan Jampidsus tersebut.

"Saya sudah bilang ke dia (Febrie) karena kondisi kesehatan yang bisa parah, saya sudah memberitahu beliau mengundurkan diri," ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Hotman juga membeberkan riwayat penyakit yang tengah dialaminya. Ia mengaku baru menjalani operasi saraf terjepit di sebuah rumah sakit di kawasan Novena, Singapura, pada 9 Juli 2026.

"Saya akhirnya operasi saraf kejepit di rumah sakit di Singapura di Novena. Dioperasi dibius total dua malam opname. Harusnya empat malam opname. Tapi seperti biasa aku rada bandel, baru dua malam aku kabur ke Hilton Hotel di Singapura. Padahal nah ini dokternya marah kan, enggak boleh," paparnya.

Setelah operasi tersebut, dokter sebenarnya meminta Hotman beristirahat selama dua pekan dan tidak menjalankan aktivitas pekerjaan. Namun, ia mengaku tetap bekerja, termasuk menangani perkara yang belakangan menjadi perhatian publik.

"Menurut dokter di sana dua minggu enggak boleh kerja. Anda tahu kan saya kerja dua minggu ini yang Anda tahulah kasusnya kan ya. Akhirnya makin parah. Aku sangat khawatir katanya kalau takut jadi lumpuh kalau karena selama dua



Duduk di kursi roda, pengacara Hotman Paris Hutapea mengumumkan mengundurkan diri sebagai kuasa hukum mantan Jampidsus Febrie Adriansyah saat ditemui di RS Medistra, Jakarta Selatan, Kamis (23/7/2026). (Ist)

bulan kan saraf gua itu ke kaki ya. Kalau sarafnya ada apa-apa kan kakinya entar enggak bisa 'nendang' lawan," tuturnya.

Dalam kesempatan lain, Hotman juga mengungkapkan bahwa dokter di Singapura kembali memperingatkannya agar tidak memaksakan diri bekerja selama masa pemulihan.

"Tapi kalau begini gua enggak bisa lagi karena dokter Singapura pun sudah marah-marah gitu loh, kenapa you kerja gitu loh," katanya.

Ia mengaku masih merasakan nyeri pada bagian tulang belakang (spine) dan khawatir kondisi tersebut dapat berkembang menjadi lebih serius apabila diabaikan.

"Besok hari Sabtu subuh saya akan diperiksa lagi. Jadi aku jujur sebenarnya aku takut lumpuh. Kadang gini kan sebenarnya belum tentu lumpuhnya," ucap Hotman.

Untuk melanjutkan proses pemulihan, Hotman mengatakan akan kembali menjalani pemeriksaan di Singapura pada Jumat dini hari.

"Jadi besok subuh saya mau ke Singapura (naik) pesawat. Kalau mau ketemu lagi di bandara pukul 0.30 WIB, cari gua di Terminal 3 Gate 1. Mudah-mudahan gua enggak disuruh opname lagi ya," katanya.

Meski memutuskan mundur dari tim kuasa hukum, Hotman memastikan hubungan baiknya dengan Febrie tetap terjaga. Menurut dia, mantan kliennya memahami keputusan tersebut.

"Ya dia bisa maklumin, enggak apa-apa dia sahabat saya juga, maklumin," ujar Hotman.

Sebelumnya, pada 17 Juli 2026, Hotman Paris mengumumkan telah bergabung sebagai salah satu kuasa

hukum Febrie Adriansyah sesuai mendampingi pemeriksaan mantan Jampidsus itu di Kejaksaan Agung. Saat itu, ia menyatakan telah menerima surat kuasa langsung dari Febrie.

"Benar hari ini (Jumat 17 Juli) Pak Febrie sudah tanda tangani surat kuasa. Ada dua tim kuasa hukum nantinya," kata Hotman kala itu.

Saat konferensi pers tersebut, ia melontarkan ucapan yang dianggap menghinakan wartawan dan memicu keberatan dari sejumlah organisasi pers. Setelah laporan pertama diajukan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), organisasi Media Independen Online (MIO) Indonesia.

Bantah Tunggak Pajak

Hotman juga membantah berbagai isu yang beredar di media sosial terkait dirinya, mulai dari tuduhan menunggak pajak hingga disebut-sebut terlibat dalam dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menjerat mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah.

Hotman menegaskan seluruh informasi tersebut merupakan fitnah. Ia bahkan menyatakan baru pertama kali mengenal Febrie Adriansyah secara langsung saat menerima surat kuasa untuk menjadi penasihat hukum mantan Jampidsus tersebut pada 17 Juli 2026.

"Ini kan gua lagi sakit, elu baca di-postingan gua lah. Postingan gua kan gua tantang orang-orang kantor pajak malah yang terkejut, itu fitnah banget itu," kata Hotman.

Selain isu pajak, Hotman juga menepis tuduhan yang mengaitkan dirinya dengan perkara dugaan TPPU

DERETAN POLEMIK SEBELUM HOTMAN MUNDUR

- **17 Juli**
Resmi menjadi kuasa hukum Febrie Adriansyah.
- **Pernyataan kontroversial:**
Sebut Kapolri harus izin Presiden, menuai kritik.
- **Bawa nama Prabowo:**
Dinilai menyeret Presiden ke perkara hukum.
- **Bersitegang dengan wartawan:**
Ucapan dinilai merendahkan profesi pers.
- **Dilaporkan ke polisi:**
PWI dan MIO Indonesia melapor ke Polda Metro Jaya.
- **Isu pajak & TPPU:**
Hotman membantah tuduhan dan menyebutnya fitnah.
- **23 Juli:**
Mundur sebagai pengacara Febrie dengan alasan kesehatan.

yang sedang dihadapi Febrie Adriansyah. Ia menegaskan tidak memiliki hubungan pribadi dengan mantan Jampidsus tersebut sebelum diminta menjadi kuasa hukum.

"Sumpah mati tahu nggak, sumpah demi Tuhan gua baru kenal, baru pertama kali ketemu Pak Febrie (Adriansyah) adalah pada saat penandatanganan surat kuasa. Semua (kabar di medsos) itu fitnah, mana pajak mana, tanya Kantor Pajak Tanjung Priok," ujarnya.

Belakangan, berbagai unggahan di media sosial menyebut Hotman memiliki tunggakan atau kekurangan pembayaran pajak atas sejumlah objek pajak. Selain itu, muncul pula narasi yang mengaitkan kepemilikan jaringan usaha hiburan Hollywings dengan dugaan TPPU yang menjerat Febrie Adriansyah.

Mantan Jampidsus Febrie Adriansyah tidak memenuhi panggilan pemeriksaan Kejaksaan Agung (Kejagung) dalam penyidikan dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU), Rabu (22/7/2026). Febrie, yang dipanggil sebagai saksi, menyampaikan alasan tidak dapat hadir karena kondisi kesehatan. (tin,antrls,kum/dya)